



► IDULADHA 2024

# Pantau Hewan Kurban, Pemkot Siagakan POV

**UMBULHARJO-** Untuk mengantisipasi masuknya hewan kurban berpenyakit, sejumlah upaya mulai dilakukan Pemkot Jogja. Salah satunya dengan mengawasi dan memperketat masuknya hewan kurban ke Kota Jogja.

Affi Annissa Karin  
[affi@harianjogja.com](mailto:affi@harianjogja.com)

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, menuturkan sebagian besar kebutuhan hewan kurban untuk Iduladha 2024 di Kota Jogja masih dicukupi dari luar daerah. Hal ini mengingat aktivitas peternakan di Kota Jogja tak begitu masif, mengingat lahan yang terbatas dan sudah dipadati oleh permukiman. "Yang pasti berkaitan dengan kurban kami harus melihat di mana kantong-kantong hewan kurban, karena kami tahu kegiatan pertanian di Kota Jogja sawah tinggal 50 hektare dan terus berkurang. Permukiman sudah sangat padat, sehingga

- Pemkot terus berupaya untuk mencegah merebaknya berbagai penyakit menular pada hewan.
- Di lapangan justru bukan karena kuratifnya, tapi preventifnya yang tidak diperhatikan.

kepentingan untuk pertanian juga sangat tidak mungkin dilakukan dalam skala besar," ujar Sugeng, belum lama ini. Sugeng menyebut jajarannya berupaya untuk mencegah merebaknya berbagai penyakit menular pada hewan. Sebab, beberapa waktu lalu sempat menyebar penyakit mulut dan kuku (PMK) hingga antraks. Pejabat otoritas veteriner (POV) di masing-masing kabupaten/kota serta di tingkat DIY juga disiagakan dalam mengawasi keluar dan masuknya hewan kurban. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan hewan secara fisik. Menurut Sugeng ini merupakan langkah preventif. Sebelum masuk wilayah Kota Jogja, hewan kurban

juga harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKHH). "Di lapangan itu justru bukan karena kuratifnya, tapi preventifnya yang tidak diperhatikan, lalu lintas ternak antarkabupaten dan provinsi ini yang harus diperhatikan," katanya. Sebelumnya, Kabid Perikanan dan Kehewan DPP Kota Jogja, Sri Panggarti, menuturkan saat ini ketersediaan hewan kurban di Kota Jogja hanya ada sekitar 160 ekor. DPP telah menggelar sosialisasi kepada panitia kurban hingga takmir masjid terkait dengan teknis penyembelihan hewan kurban. Para pedagang pasar tiban juga memperoleh sosialisasi terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan serta kesejahteraan hewan. "Penjual harus memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah kemantren setempat. Izin masih diformulasikan. Kami ingin menata tempat penjualan itu agar tidak menggunakan fasilitas yang mengganggu masyarakat. Kami bakal memantau pengelolaan limbah dan kesehatan hewannya," tuturnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005